I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari generasi muda, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Arti dari anak dalam Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan kesejahteraan anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta perlakuan

tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkannya, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai Undang-Undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibahas baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya peradilan anak telah timbul dimana-mana. Perhatian mengenai masalah perlindungan anak ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Right* Tahun 1958. bertolak dari itu, kemudian pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of The Rights of The Child*/Deklarasi hak-hak anak (www.hukumonline.com, akses 23 September 2011, 09:45).

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun anak akan dikenai campur tangan semena-mena atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyuratnya, atau mendapat serangan tidak sah atas harga diri dan reputasinya. Selanjutnya pada Ayat (2) menjelaskan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari campur tangan atau serangan semacam itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah dan surat menyurat serta dari fitnah. Di Indonesia secara sosiologis perhatian terhadap anak-anak telah mulai ada sejak adanya berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun badan-badan sosial, seperti Yayasan Pra Yuwana dan Wisma Permadi Siwi yang pada akhirnya telah mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, tetapi dalam pelaksanaannya, kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa perlindungan anak

merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, nasionalisme, berakhlak mulia, serta berkemauan keras menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara.

Perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

(www.hukumonline.com, akses 23 September 2011, 09:45).

Pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Permasalahan anak yang sangat mengkhawatirkan saat ini adalah penganiayaan, perilaku kekerasan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa. Perilaku ini merupakan pelanggaran mendasar atas hak anak yang merupakan kejahatan sangat keji yang harus dihukum seberat-beratnya.

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak bukanlah hal yang baru di masyarakat. Hal ini menarik untuk diteliti karena dari waktu ke waktu peristiwa kejahatan ini selalu meningkat. Tindak pidana penganiayaan ini menjadi masalah bagi masyarakat, karena pelakunya adalah orang terdekat atau dikenal oleh korbannya. Hal ini adalah bentuk perlakuan terburuk terhadap anak yang dikategorikan sebagai kekerasan paling brutal terhadap anak. Anak-anak yang menjadi korban menjadi sangat trauma atas pengalaman penganiayaan terhadapnya. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak merupakan hal yang sangat kompleks, sehingga harus diselesaikan sampai ke akar persoalannya. Ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Ketentuan yang juga mengatur tentang tindak pidana penganiayaan adalah ketentuan dalam Pasal 351 KUHP yang menjelaskan bahwa:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.
- (4) Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sehubungan dengan hal diatas, tindak pidana penganiayaan terhadap anak masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah lebih khususnya Komisi Perlindungan Anak yang memiliki peran penting dalam menanggapi berbagai kasus yang terjadi.

Berkaitan dengan hal itu, berdasarkan data dari *Pra research* (para penelitian) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang diperoleh data bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap anak juga terjadi di Provinsi Lampung, hal itu dapat dilihat

dari Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1727/Pid.B/2009/PN.TK tentang kasus penganiayaan terhadap anak. Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan telah menganiaya seorang anak.

Adapun kronologis singkat dalam perkara tersebut yaitu berawal pada hari rabu tanggal 30 September 2009 yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yaitu terhadap saksi korban Wijaya Bin Hanawi, perbuatan bermula pada saat korban sedang bermain Internet yang waktu sewanya sudah habis secara tidak sengaja mengetik *Pass Word* (kata kunci) di komputer untuk membatasi waktu pemakaian terbuka.

Terdakwa Fransiscus Afrizal menegur saksi korban dan membawanya turun kedapur yang berada di lantai 1, pada saat itu saksi M. Sunandar Bin Kholid sedang memasak mie di dapur melihat terdakwa menampari pipi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa keluar dapur kemudian masuk lagi dan langsung menendang tubuh bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menampari lagi pipi korban, selanjutnya terdakwa mengambil kayu balok lalu dipukulkan ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali, setelahnya terdakwa langsung mencekik leher korban.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Majelis Hakim sepakat menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan pidana penjara. Masa penahanan yang telah dijalani dikurangi

dengan pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap ditahan dan dibebani biaya perkara Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu balok dirampas untuk dimusnahkan (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1727/Pid.B/2009/PN.TK).

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut apakah dapat dimintai pertanggungjawabannya, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga ia dapat dipidana oleh Hakim.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut memang sudah memenuhi ketentuan Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Jika Hakim menjatuhkan pidana penjara maksimum terhadap pelaku, boleh ia lakukan karena hakim mempunyai kebebasan yang tidak boleh diintervensi, namun apakah pidana tersebut telah tepat, sehingga telah memenuhi tujuan pemidanaan dan memenuhi rasa keadilan bagi pelaku dan masyarakat. Apakah putusan tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang mesti diperhatikan oleh hakim, seperti dakwaan jaksa, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, latarbelakang pelaku, faktor korban dan keyakinan hakim sendiri. Terkadang putusan hakim tidak pernah mencapai pidana yang maksimum seperti yang diancamkan dalam undang-undang. Hal ini tentu saja menimbulkan gejolak di masyarakat yang menginginkan pelaku tindak pidana yang serendah-rendahnya. Di sinilah peranan hakim sebagai penengah di antara keduanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1727/Pid.B/2009/PN.TK)”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak?
- b. Mengapa hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana anak di Indonesia khususnya hanya terbatas pada masalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak (Studi Perkara Nomor 1727/Pid.B/2009/PN.TK) dan mengapa hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak (Studi Perkara Nomor 1727/Pid.B/2009/PN.TK). Sedangkan ruang lingkup tempat penelitian hanya dibatasi pada Pengadilan

Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak?
- b. Untuk mengetahui bahwa Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1727/Pid.B/2009/PN.TK).

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana anak Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Sikap hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pada hakikatnya selalu memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut. Berkaitan dengan sikap hakim dalam menjatuhkan vonis dalam rangka mencapai keadilan pada tujuan pembedaan maka secara teoritis memiliki 4 (empat) tujuan pembedaan antara lain:

- a. Mempengaruhi perilaku kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut pencegahan sosial.
- b. Mempengaruhi perilaku kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terdakwa.

- c. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
- d. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.
(Sudarto, 1997: 196).

Sehubungan dengan hal di atas, dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hukum pidana hanya dapat dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Walaupun pengakuan terhadap hukum yang hidup sudah lama ada dalam peraturan perundang-undangan tetapi kenyataannya aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) enggan memproses seseorang yang menurut hukum patut dipidana. Aparat penegak hukum hanya berpegang pada peraturan perundang-undangan positif saja.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, selain mencakup teori sebab kejahatan, teori tujuan pembedaan, dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori dasar pertimbangan hakim. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

b. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak

diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

Tindak pidana adalah suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial, melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *Onrecht*, sebagai perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan tata hukum, (Moeljatno, 1973: 71). Sehubungan dengan hal itu, untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini, teori yang akan digunakan beberapa teori antara lain mengenai teori sebab kejahatan, teori tujuan pemidanaan, dan teori pertimbangan hakim.

1. Teori tentang sebab kejahatan

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh W.A. Bonger ada beberapa teori mengenai sebab kejahatan antara lain :

a. Dari Aspek Fisik

Dalam teori ini memberikan gambaran tentang sebab kejahatan adalah pada ciri-ciri fisik seseorang melakukan suatu kejahatan. Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso yang mengemukakan bakat jahat itu diturunkan dari nenek moyang, kemudian bakat tersebut tidak dapat dirubah. Dalam melihat ciri-ciri

seseorang yang melakukan kejahatan teori ini melihat dari aspek fisik yang berbeda dengan manusia lainnya seperti, bertato, berahang kuat dan lain-lain.

b. Dari Aspek Psikologis

Pada umumnya ahli-ahli psikologis mengembangkan ilmunya dengan cara membagi manusia dalam tipe-tipe tertentu (tipologi). Psikologi criminal mempelajari ciri-ciri para pelaku kejahatan yang “sehat”, sehat dalam pengertian psikologis. Dalam pengertian ini yang dimaksud adalah sehat dalam mental tetapi dapat melakukan kejahatan.

c. Dari Aspek Sosio-Kultural (Sosio Kriminal)

Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis anggotanya, antara kelompok sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 32).

b. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (M. Marwan, 2009: 609).

c. Perkara

Perkara adalah pertikaian, perselisihan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, sebuah konflik hukum yang berkembang atau berubah menjadi di sebuah sengketa/kasus apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian/penderitaan atau kepada pihak lain (Tolib Setiady, 2010: 24).

d. Tindak Pidana/Perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno (Tolib Setiady, 2010: 9) menerangkan bahwa *strafbaar feit* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

e. Penganiayaan

Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa dengan kekerasan terhadap orang secara melawan hukum. Penjelasan umum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penganiayaan adalah perbuatan seseorang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka.

Berdasarkan penjelasan umum ketentuan Pasal 351 KUHP yang menjelaskan bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa dengan kekerasan terhadap orang secara melawan hukum yang mengakibatkan luka berat, mengakibatkan kematian, ataupun dengan sengaja merusak kesehatan orang.

f. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang Penganiayaan Terhadap Anak Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1727/Pid.B/2009/PN.TK.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang Pengertian Anak, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Pengertian Pelaku Tindak Pidana, Pengertian Penganiayaan, Tinjauan mengenai Proses Penjatuhan Putusan Oleh Hakim.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak (Studi Perkara Nomor 1727/Pid.B/2009/PN.TK) dan Untuk mengetahui bahwa hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak (Studi Perkara Nomor 1727/Pid.B/2009/PN.TK).

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Marwan, M. 2009. *Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Saleh, Roeslan. 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- _____ 1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soesilo, R. 1999. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Sudarto. 1997. *Hukum Pidana*. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1727/Pid.B/2009/PN.TK